Analysis of Independence Ratio, Effectiveness Ratio and Growth Ratio in Assessing the Financial Performance of Bandung City Government

Siti Nur Fadhilah Nasution[1], Annisa Syahrani[2], Prilia Astari[3], Githa Amelia JS[4], Nancy Marbun[5], Vivi Febyani[6]
[1,2,3,4,5,6]Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia
Email: sitinur.fadhilahnst@gmail.com; annisasyahrani.akdu@gmail.com; priliaastari97@gmail.com; githaamelias@gmail.com; nancyseptriasamrbn@gmail.com; vivifebyanisebayang1122@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung selama periode 2020–2024 menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah. Analisis ini penting mengingat peran strategis Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Jawa Barat, sehingga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dianalisis melalui perhitungan rasio keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi dengan pola hubungan delegatif. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan peningkatan, namun masih berada pada kategori kurang efektif, terutama pada masa pandemi. Sementara itu, rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah mengalami fluktuasi dengan penurunan pada masa pandemi dan pemulihan pada tahun-tahun berikutnya.

Kata Kunci: kinerja keuangan daerah; rasio kemandirian; rasio efektivitas; rasio pertumbuhan; Kota Bandung

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Bandung City Government during the 2020–2024 period using the financial independence ratio, effectiveness ratio, and financial growth ratio. This analysis is important considering the strategic role of Bandung City as a center of government and economic activity in West Java Province, making the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) an important factor in supporting regional development. This study employs a quantitative descriptive method using secondary data in the form of Budget Realization Reports obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The data were analyzed through the calculation of regional financial ratios. The results indicate that the financial independence ratio falls into the high to very high category with a delegative relationship pattern. The effectiveness ratio of local own-source revenue shows improvement but remains in the less effective category, particularly during the pandemic period. Meanwhile, revenue and expenditure growth ratios fluctuate, with declines during the pandemic and recovery in subsequent years.

Keyword: regional financial performance; independence ratio; effectiveness ratio; growth ratio; Bandung City

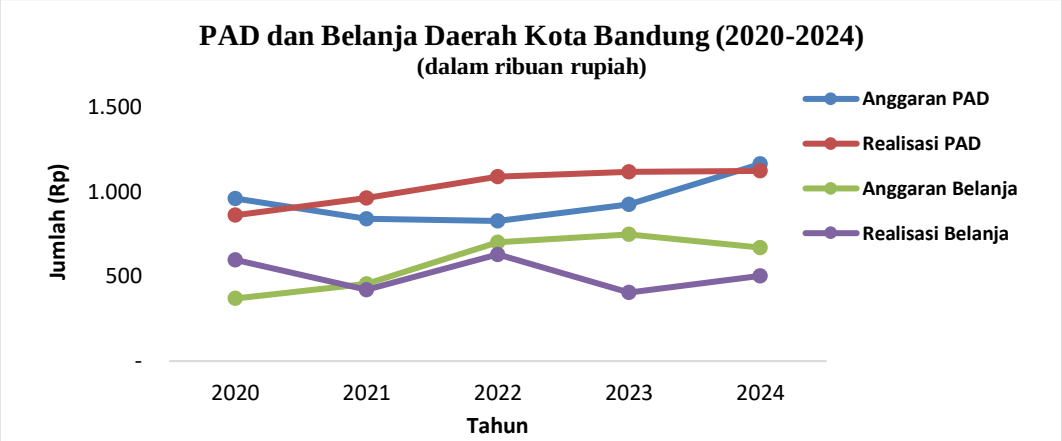
Corresponding Author:
Siti Nur Fadhilah Nasution,
Universitas Pembangunan Panca Budi,
Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan,
Sumatera Utara 20122, Indonesia
Email: sitinur.fadhilahnst@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek fundamental yang berperan besar dalam terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Argariny Patompo & Untu, 2019). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, melalui mekanisme desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memperoleh otonomi untuk mengelola pendapatan dan keuangan secara mandiri guna mendukung percepatan pemerataan pembangunan daerah. Kewenangan besar pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara mandiri menunjukkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien tanpa ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat. Meskipun demikian, otonomi tersebut harus diiringi dengan manajemen keuangan yang berkualitas agar mampu menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang kuat dan berkelanjutan (Theresiana & Supriyadi, 2025).

Pengukuran kinerja keuangan memiliki tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan proses pengambilan keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas publik dan memperkuat komunikasi antar lembaga (Mardiasmo, 2018). Pengukuran kinerja keuangan diperlukan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi fiskalnya dengan baik (Anshori, 2019). Kinerja keuangan daerah dapat dievaluasi melalui berbagai indikator fiskal, salah satunya pengukuran rasio keuangan. Pentingnya analisis rasio keuangan semakin meningkat sejalan dengan harapan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD (Junaid & Serliyana, 2024).

Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di tingkat daerah. Sebagai pusat aktivitas di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung menghadapi beban dan dinamika pembangunan yang cukup kompleks karena berfungsi sebagai pusat mobilitas, layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pemerintah daerah Kota Bandung tidak hanya berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga wajib mengelola APBD secara optimal. Pelaksanaan perencanaan dan realisasi APBD menjadi tahap penting untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja keuangan daerah setiap tahunnya. Informasi tersebut memungkinkan pemerintah daerah menilai efektivitas pengelolaan keuangan serta melakukan perbaikan pada periode anggaran berikutnya.



Gambar 1. PAD dan Belanja Daerah Kota Bandung (2020–2024)
Sumber: DJPK Kemenkeu; diolah penulis (2025)

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi APBD Kota Bandung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan peningkatan dalam kinerja keuangan daerah yang mencerminkan kemajuan pemerintah Kota Bandung dalam mengelola pendapatan dan belanja seiring pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan realisasi yang perlu dianalisis lebih dalam untuk mengidentifikasi adanya persoalan struktural maupun situasional dalam proses penganggaran. Dengan adanya perubahan naik turunnya realisasi APBD, hal ini juga akan menentukan naik turunnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk mengatasi perbedaan capaian realisasi APBD setiap tahunnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi rasio keuangan secara berkala terhadap rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan pendapatan serta belanja sehingga pemerintah dapat menelusuri sumber penyebab tidak tercapainya target, mengendalikan pola belanja daerah, serta merumuskan kembali strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (Alfiani, 2024).

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Semakin tinggi rasionya, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Namun, berbagai penelitian

menunjukkan bahwa banyak daerah masih berada pada kategori rendah. Penelitian Junaid & Serliyana (2024) mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Tarakan menemukan bahwa kemandirian fiskal masih bergantung pada dana transfer sehingga pemerintah belum mampu berdiri secara finansial. Pada penelitian Hafizi & Amalia (2022) yang memperlihatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jember menunjukkan bahwa PAD yang tercatat belum cukup kuat untuk mendorong otonomi fiskal yang memadai.

Sementara itu, rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah merealisasikan target PAD sesuai potensi yang dimiliki. Penelitian Alfiani (2024) menunjukkan efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Bogor belum maksimal, meski cukup baik pada beberapa tahun tertentu. Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa efektivitas PAD belum konsisten dari tahun ke tahun. Terakhir, rasio pertumbuhan yang mengukur perkembangan kemampuan keuangan daerah dari waktu ke waktu, sehingga dapat digunakan untuk melihat dinamika kemampuan fiskal jangka panjang. Temuan pada penelitian Irwan (2025) yang menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar memperlihatkan pertumbuhan pendapatan dan belanja yang tidak stabil, menyebabkan pertumbuhan PAD cenderung lambat dan belum mampu meningkatkan kapasitas fiskal secara signifikan. Secara keseluruhan, hasil penelitian terdahulu memberi gambaran bahwa ketiga rasio tersebut masih menunjukkan tantangan fiskal yang sama, yaitu rendahnya kemandirian, efektivitas yang belum konsisten, serta pertumbuhan pendapatan yang belum kuat menandakan perlunya strategi keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan pada pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah Kota Bandung perlu dilakukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai kinerja keuangan secara kronologis dan objektif sehingga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meninjau kembali strategi pengelolaan pendapatan, meningkatkan efisiensi belanja, dan memperkuat kemandirian fiskal.

2. LITERATURE REVIEW

A. Dasar Konseptual Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses yang membentuk kinerja fiskal secara utuh. Pengelolaan keuangan daerah bekerja melalui rangkaian proses yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan pendapatan, penetapan target anggaran, pelaksanaan pemungutan, hingga evaluasi capaian fiskal. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas kinerja keuangan yang dihasilkan merupakan gambaran dari bagaimana seluruh proses tersebut berjalan secara terpadu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen penting yang menunjukkan sejauh mana daerah mampu mengandalkan sumber daya internal untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Halim (2012) menjelaskan bahwa PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam mendayagunakan potensi ekonomi secara mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Ketergantungan terhadap dana transfer menggambarkan seberapa kuat atau lemahnya posisi fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja. Oleh karena itu, indikator seperti rasio kemandirian digunakan untuk menilai sejauh mana daerah dapat berdiri pada kapasitas fiskalnya sendiri.

Di sisi lain, kemampuan daerah dalam merealisasikan target PAD menunjukkan kualitas pelaksanaan pengelolaan pendapatannya. Mahmudi (2019) menegaskan bahwa efektivitas pendapatan merupakan ukuran penting yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Ketika realisasi pendapatan dapat dicapai atau bahkan melampaui target, hal tersebut menunjukkan bahwa proses penganggaran, pemungutan, hingga pengawasan pendapatan berjalan efektif. Karena itu, rasio efektivitas digunakan untuk menggambarkan seberapa optimal pemerintah daerah dalam mengelola potensi pendapatannya.

Perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun kemudian menjadi ukuran keberlanjutan kinerja fiskal daerah. Pertumbuhan pendapatan mencerminkan dinamika peningkatan kapasitas fiskal, efektivitas kebijakan pendapatan, serta kemampuan daerah beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang berubah. Analisis pertumbuhan pendapatan penting untuk melihat kecenderungan positif atau negatif kinerja keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Oleh sebab itu, rasio pertumbuhan digunakan untuk melihat apakah kinerja keuangan daerah menunjukkan perbaikan atau sebaliknya.

Ketiga rasio tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan sebagai gambaran kualitas keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Halim (2012) menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan secara komprehensif mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kapasitas fiskal, efektivitas pengelolaan pendapatan, dan perkembangan keuangan pemerintah daerah. Dengan menganalisis ketiganya secara bersamaan, dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai bagaimana Pemerintah Kota Bandung mengelola

sumber daya pendapatannya, seberapa mandiri daerah tersebut dari bantuan eksternal, serta bagaimana perkembangan kinerjanya dari waktu ke waktu. Penilaian ini menjadi dasar penting dalam melihat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

B. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan wujud dari pencapaian daerah dalam periode tertentu terkait dengan keuangan daerah. Keuangan daerah yaitu segala hak dan kewajiban suatu daerah dinilai berdasarkan uang dan segala sesuatunya yang berbentuk uang serta barang yang dapat menjadi milik daerah sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Keberhasilan suatu daerah dapat dinilai dengan efisiensi dan efektivitas dalam realisasi anggaran suatu daerah.

Tujuan dari pengukuran kinerja pemerintah adalah untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan (Tandiseru & Pesudo, 2016). Pemerintah daerah merupakan pihak yang sangat penting dalam mengelola keuangan daerah. Kinerja pemerintah dapat dilihat dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kualitas serta dalam pengambilan keputusan.

C. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri aktivitas atau kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak serta retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim & Kusufi, 2012).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}\ x\ 100\% \quad (1)$$

Nilai kemandirian daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Rasio Kemandirian

Kemampuan Daerah	Persentase Kemandirian	Kemandirian
Rendah Sekali	0% -25%	Instruktif
Rendah	25% -50%	Konsultatif
Sedang	50% -75%	Partisipatif
Tinggi	75% -100%	Delegatif

1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

D. Rasio Efektivitas PAD

Menurut Abdul Halim (2012), rasio efektivitas PAD menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang telah dianggarkan dibandingkan dengan jumlah target/anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan rumus rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}}\ x\ 100\% \quad (2)$$

Nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Rasio Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

E. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019), analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik kenaikan atau penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah selama kurun waktu tertentu. Jadi, rasio pertumbuhan menggambarkan bagaimana pertumbuhan pendapatan dari satu periode ke periode selanjutnya apakah mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

1) Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan pendapatan daerah (Mahmudi, 2019).

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \; x \; 100\% \quad (3)$$

Keterangan:

X_t = Realisasi pendapatan pada tahun t

X_{t-1} = Realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya

Kriteria untuk pengukuran pertumbuhan yaitu: (1) jika angkanya naik maka pertumbuhannya positif, (2) jika angkanya turun maka pertumbuhannya negatif.

2) Rasio Pertumbuhan Belanja

Rasio pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan belanja daerah (Mahmudi, 2019).

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \; x \; 100\% \quad (4)$$

Keterangan:

X_t = Realisasi belanja pada tahun t

X_{t-1} = Realisasi belanja pada tahun sebelumnya

Kriteria untuk pengukuran pertumbuhan yaitu: (1) jika angkanya naik maka pertumbuhannya positif, (2) jika angkanya turun maka pertumbuhannya negatif.

3. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung melalui perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah selama periode 2020–2024. Jenis data yang digunakan adalah data primer, berupa data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung yang diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan ke dalam kelompok data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran PAD, dan Realisasi PAD sesuai kebutuhan perhitungan rasio. Teknik analisis data dilakukan dengan menghitung rasio-rasio keuangan daerah, lalu disajikan dalam bentuk tabel, angka persentase, dan perbandingan antartahun sehingga mempermudah pemahaman terhadap hasil analisis. Setelah itu, hasil yang telah disajikan tersebut diinterpretasikan untuk menggambarkan kondisi kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung selama lima tahun terakhir.

4. RESULTS AND DISCUSSION

A. Hasil

1) Data Keuangan

Berikut data keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 – 2024.

Tabel 3. Data Keuangan Pemerintah Kota Bandung

No	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan	5,643,962,288,459	5,838,244,931,395	6,415,745,415,059	6,354,758,084,404	7,153,103,797,810
2	PAD	2,063,783,773,736	2,195,971,884,100	2,754,477,948,218	2,677,743,298,886	3,091,256,996,423
3	TKDD	2,493,601,894,377	2,456,731,325,691	2,575,338,252,042	2,563,635,795,182	2,942,184,122,932
4	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1,086,576,620,346	1,185,541,721,604	1,085,929,214,799	1,113,378,990,336	1,119,662,678,455
5	Belanja	5,407,125,732,054	5,675,599,520,638	6,473,479,211,554	6,305,425,351,601	7,067,211,608,536
6	Belanja Pegawai	2,169,321,718,452	2,236,006,671,238	2,480,313,890,636	2,282,885,327,379	2,533,766,065,534
7	Belanja Barang dan Jasa	2,084,516,874,513	2,296,416,699,844	2,720,792,748,876	2,713,016,370,875	3,251,568,938,521
8	Belanja Modal	558,480,387,618	721,566,424,793	644,171,724,240	905,926,149,511	781,389,294,527
9	Belanja Lainnya	594,806,751,471	421,609,724,763	628,200,847,802	403,597,503,836	500,487,309,954
10	Pembiayaan	241,601,684,943	436,836,525,224	587,116,062,736	-	684,801,392,854
11	Penerimaan Daerah	241,601,684,943	474,744,273,061	598,021,873,731	529,382,643,727	689,265,290,854
12	Pengeluaran Daerah	-	37,907,747,837	10,905,810,995	-	4,463,898,000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun anggaran 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang kuat dalam hal pendapatan dan belanja daerah yang mencerminkan ekspansi aktivitas fiskal. Total pendapatan melonjak signifikan dari Rp5.643.962.288.459 pada tahun 2020 menjadi Rp7.153.103.797.810 pada tahun 2024, tetapi terjadi sedikit penurunan pendapatan pada tahun 2023 sebelum kembali melonjak tinggi di tahun 2024. Di sisi pengeluaran, total belanja juga meningkat dari Rp5.407.125.732.054 pada tahun 2020 menjadi Rp7.067.211.608.536 pada tahun 2024, meskipun ada sedikit penurunan di tahun 2023.

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri aktivitas atau kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak serta retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim & Kusufi, 2012).

Tabel 4. Rasio Kemandirian Kota Bandung Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian	Hasil Kriteria	Pola Hubungan
2020	2,063,783,773,736	2,493,601,894,377	82.76%	Tinggi	Delegatif
2021	2,195,971,884,100	2,456,731,325,691	89.39%	Tinggi	Delegatif
2022	2,754,477,948,218	2,575,338,252,042	106.96%	Sangat Tinggi	Delegatif
2023	2,677,743,298,886	2,563,635,795,182	104.45%	Sangat Tinggi	Delegatif
2024	3,091,256,996,423	2,942,184,122,932	105.07%	Sangat Tinggi	Delegatif

Berdasarkan perhitungan tabel di atas selama periode 2020 sampai 2024, terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer menunjukkan tren yang meningkat dan tetap berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, yang menggambarkan bahwa pemerintah daerah sudah mampu membiayai kegiatan pemerintahannya melalui sumber pendapatan asli. Sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menjadi sangat rendah.

Dilihat dari pola hubungan keuangan, mulai dari tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan pola hubungan delegatif. Pola ini menandakan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kemampuan yang kuat dalam mengelola keuangannya secara mandiri, sehingga pemerintah pusat hanya berperan memberikan delegasi kewenangan tanpa dominasi instruksi.

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki tingkat kemandirian yang baik dan terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini dapat mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Bandung dalam memaksimalkan PAD yang dimilikinya melalui peningkatan kualitas layanan publik, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta efisiensi dalam pengelolaan aset daerah. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan keberlanjutan fiskal daerah tanpa bergantung sepenuhnya pada dana pusat.

3) Rasio Efektivitas PAD

Menurut Abdul Halim (2012), rasio efektivitas PAD menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang telah dianggarkan dibandingkan dengan jumlah target atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 5. Rasio Efektivitas Kota Bandung Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Anggaran Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Hasil Kriteria
2020	2,063,783,773,736	3,339,363,515,736	61.80%	Tidak Efektif
2021	2,195,971,884,100	3,300,827,453,188	66.53%	Tidak Efektif
2022	2,754,477,948,218	3,165,808,943,749	87.01%	Kurang Efektif
2023	2,677,743,298,886	3,211,761,339,322	83.37%	Kurang Efektif
2024	3,091,256,996,423	3,449,126,791,482	89.62%	Kurang Efektif

Berdasarkan perhitungan tabel di atas selama periode 2020 sampai 2024, terlihat bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target PAD masih belum optimal. Pada tahun 2020, rasio efektivitas berada pada angka 61,80% yang termasuk dalam kategori tidak efektif. Rendahnya capaian ini tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan drastis aktivitas ekonomi, pembatasan mobilitas masyarakat, penurunan daya beli, serta menurunnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Kondisi ini masih berlanjut di tahun 2021 yang memengaruhi tingkat efektivitas PAD, rasionya hanya mencapai 66,53% dan tetap berada dalam kategori tidak efektif.

Memasuki tahun 2022, kondisi mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan dan mulai pulihnya aktivitas ekonomi. Hal ini tercermin dari peningkatan rasio efektivitas sebesar 87,01% meskipun masih dalam kategori kurang efektif, dan berlanjut hingga tahun 2024. Secara keseluruhan, tren aktivitas PAD lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan bertahap, meskipun Pemerintah Kota Bandung masih perlu meningkatkan strategi pendapatan agar target PAD dapat tercapai secara optimal.

4) Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019), analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik kenaikan atau penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah selama kurun waktu tertentu. Jadi, rasio pertumbuhan menggambarkan bagaimana pertumbuhan pendapatan dari satu periode ke periode selanjutnya apakah mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

a) Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 6. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kota Bandung Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pendapatan Pada Tahun t	Realisasi Pendapatan Pada Tahun t - 1	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Hasil Kinerja
2020	5,643,962,288,458.90	6,381,818,944,636.00	-11.56%	Negatif

Tahun	Realisasi Pendapatan Pada Tahun t	Realisasi Pendapatan Pada Tahun t - 1	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Hasil Kinerja
2021	5,838,244,931,395.00	5,643,962,288,458.90	3.44%	Positif
2022	6,415,745,415,059.40	5,838,244,931,395.00	9.89%	Positif
2023	6,354,758,084,404.00	6,415,745,415,059.40	-0.95%	Negatif
2024	7,153,103,797,809.90	6,354,758,084,404.00	12.56%	Positif

Berdasarkan data rasio pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa kinerja pendapatan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi, termasuk pandemi. Pada tahun 2020, pertumbuhan pendapatan sebesar -11,56% menunjukkan penurunan yang cukup tajam. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh dampak Covid-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, penurunan konsumsi masyarakat, serta berkurangnya pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Memasuki tahun 2021 hingga 2022, pendapatan mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan positif seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan, yang menandakan adanya pelemahan meskipun tidak signifikan. Kenaikan kinerja positif kembali terlihat di tahun 2024 dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 12,56%, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi berbagai sumber penerimaan.

b) Rasio Pertumbuhan Belanja

Tabel 7. Rasio Pertumbuhan Belanja Kota Bandung Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Belanja Pada Tahun t	Realisasi Belanja Pada Tahun t - 1	Rasio Pertumbuhan Belanja	Hasil Kinerja
2020	5,407,125,732,054.00	6,312,147,268,360.00	-14.34%	Negatif
2021	5,675,599,520,638.20	5,407,125,732,054.00	4.97%	Positif
2022	6,473,479,211,554.30	5,675,599,520,638.20	14.06%	Positif
2023	6,305,425,351,601.00	6,473,479,211,554.30	-2.60%	Negatif
2024	7,067,211,608,536.00	6,305,425,351,601.00	12.08%	Positif

Pertumbuhan belanja daerah selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang berubah-ubah dan dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi, termasuk dampak pandemi. Pada tahun 2020, pertumbuhan belanja mengalami penurunan yang signifikan sebesar -14,34%. Penurunan ini berkaitan dengan kondisi Covid-19 yang memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran, *refocusing*, serta relokasi belanja untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sehingga beberapa program prioritas harus ditunda. Memasuki tahun 2021, terjadi perbaikan dengan pertumbuhan positif hingga tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali sebesar -2,60% yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tahun 2024, belanja daerah kembali meningkat yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan anggaran untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan.

B. Pembahasan

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Pemerintah Kota Bandung berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi selama periode 2020–2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Bandung memiliki kapasitas fiskal yang kuat dalam membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri, sehingga tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat relatif rendah. Secara teoretis, Halim dan Kusufi menjelaskan bahwa tingginya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi fiskal internal. Temuan tersebut selaras dengan penelitian Karenina et al. (2021), yang menemukan bahwa kota-kota besar dengan kapasitas ekonomi tinggi cenderung memiliki rasio kemandirian yang kuat karena basis PAD yang luas. Selain itu, penelitian Hamdigam (2019) menguatkan bahwa daerah dengan struktur ekonomi yang stabil akan mampu mempertahankan tingkat kemandirian fiskal meskipun menghadapi tekanan ekonomi. Siregar (2022) juga menunjukkan bahwa daerah perkotaan besar tetap dapat mempertahankan kemandirian fiskal karena adanya diversifikasi sumber pendapatan. Begitu pula dengan temuan Syamsul et al. (2022), yang menyatakan bahwa pada masa pemulihan ekonomi, kota besar cenderung mengalami konsistensi kemandirian fiskal yang lebih tinggi dibandingkan daerah non-metropolitan. Dengan demikian, kemandirian fiskal Kota Bandung sepenuhnya sejalan dengan teori dan didukung oleh hasil penelitian empiris terbaru.

2) Rasio Efektivitas PAD

Berbeda dengan kemandirian fiskal, rasio efektivitas PAD Kota Bandung menunjukkan kondisi yang kurang optimal. Pada tahun 2020 dan 2021, efektivitas berada pada kategori tidak efektif, lalu meningkat menjadi kurang efektif pada tahun 2022 hingga 2024. Menurut teori Mahmudi, efektivitas PAD merupakan indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan. Rendahnya tingkat efektivitas Bandung pada awal masa penelitian sangat dipengaruhi oleh pandemi *Covid-19*, ketika aktivitas ekonomi mengalami perlambatan signifikan. Temuan ini sesuai dengan penelitian Hamdigam (2019), yang membuktikan bahwa hampir seluruh pemerintah daerah mengalami penurunan tajam efektivitas PAD akibat

penurunan konsumsi dan aktivitas ekonomi pada masa pandemi. Setelah masa pandemi, efektivitas Kota Bandung mulai membaik, namun masih belum mencapai kategori efektif. Kondisi ini konsisten dengan penelitian Mulyani et al. (2025), yang menemukan bahwa meskipun terjadi pemulihan pendapatan di beberapa daerah, sebagian besar pemerintah daerah masih berada dalam kategori kurang efektif karena target pemulihan yang terlalu ambisius. Selain itu, Siregar (2022) menunjukkan bahwa proses pemulihan PAD pascapandemi berjalan secara bertahap dan banyak daerah belum sepenuhnya kembali pada performa optimal. Penelitian Syamsul et al. (2022) juga menyatakan bahwa PAD di sejumlah daerah masih mengalami hambatan akibat struktur pajak daerah yang belum sepenuhnya pulih. Dengan demikian, kondisi efektivitas PAD Kota Bandung sepenuhnya konsisten dengan teori serta selaras dengan tren nasional berdasarkan penelitian-penelitian terbaru.

3) Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Bandung menunjukkan pola yang berubah-ubah sepanjang 2020–2024. Penurunan tajam pada tahun 2020 mencerminkan dampak pandemi yang menghambat aktivitas ekonomi, sedangkan peningkatan pada 2021 dan 2022 menunjukkan adanya pemulihan fiskal. Penurunan kecil pada 2023 menggambarkan fase penyesuaian fiskal, sementara peningkatan tajam pada 2024 menunjukkan akselerasi pemulihan. Pola ini sesuai dengan teori Mahmudi yang menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan merupakan indikator respons daerah terhadap perubahan kondisi ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Karenina et al. (2021), yang menyebutkan bahwa pandemi menjadi faktor utama menurunnya pendapatan daerah secara nasional. Saputra (2021) juga mencatat bahwa kota-kota besar mengalami penurunan pendapatan signifikan pada 2020, tetapi menunjukkan pemulihan lebih cepat setelahnya. Siregar (2022) mengungkapkan bahwa pertumbuhan pendapatan pascapandemi cenderung bersifat fluktuatif karena ketidakpastian ekonomi yang masih berlangsung. Syamsul et al. (2022) kemudian menekankan bahwa di tahun 2023–2024 akan ada fase pemulihan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan daerah yang cukup signifikan di kota-kota besar, yang sejalan dengan pola Kota Bandung.

Pertumbuhan belanja daerah memperlihatkan tren yang relatif sama. Penurunan belanja pada 2020 merupakan konsekuensi kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi, sesuai dengan temuan Mulyani et al. (2025) yang menunjukkan bahwa sebagian besar daerah menurunkan belanja pembangunan dan mengalihkan anggaran untuk penanganan kesehatan. Pada tahun-tahun berikutnya, belanja mengalami peningkatan seiring pemulihan aktivitas pemerintahan. Pola ini didukung oleh penelitian Siregar (2022) yang menyatakan bahwa belanja daerah cenderung kembali meningkat ketika perekonomian mulai stabil. Syamsul et al. (2022) juga menjelaskan bahwa peningkatan belanja akan menggambarkan fase ekspansi fiskal yang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dinamika pertumbuhan pendapatan dan belanja Kota Bandung konsisten dengan teori serta sangat sejalan dengan tren empiris terbaru.

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis rasio kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung periode 2020–2024, terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dari sisi kemandirian, efektivitas, serta pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah.

Pertama, dari sisi kemandirian keuangan, Kota Bandung memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membiayai kegiatan pemerintahan dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai rasio kemandirian yang tinggi menunjukkan bahwa Kota Bandung mampu menjalankan fungsi pemerintahan tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini menandakan bahwa potensi pendapatan daerah dapat dikelola dengan baik.

Kedua, dari sisi efektivitas PAD, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bandung belum mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 dan 2021, efektivitas pendapatan berada pada kategori tidak efektif, sedangkan pada tahun 2022 hingga 2024 berada pada kategori kurang efektif. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan aktivitas ekonomi pada masa pandemi dan proses pemulihan yang berjalan secara bertahap. Meskipun terdapat peningkatan dari tahun ke tahun, pencapaiannya masih belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Ketiga, dari sisi pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah, Kota Bandung mengalami perubahan kondisi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pendapatan dan belanja menurun karena dampak pandemi dan kebijakan pengalihan anggaran untuk penanganan kesehatan. Memasuki tahun 2021 dan 2022, pendapatan mulai meningkat seiring pemulihan kegiatan ekonomi. Pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali, sebelum akhirnya meningkat cukup baik pada tahun 2024. Pola perubahan ini menggambarkan bahwa kondisi keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi dan kebijakan pemerintah selama masa pandemi dan setelahnya.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung menunjukkan bahwa tingkat kemandirian sudah sangat baik, namun efektivitas pencapaian pendapatan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengoptimalan sumber-sumber PAD. Pertumbuhan pendapatan dan belanja yang berubah-ubah

setiap tahun menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pengelolaan keuangan agar lebih stabil dan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

REFERENCES

Alfiani, A., Armeliza, D., & Nasution, H. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada Kabupaten Bogor. *Journal of Business Innovation and Accounting Research, 1*(2), 74-87. https://doi.org/10.56442/h23web39

Anshori, Z. (2019). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016–2018 (studi kasus pada BPKAD Kabupaten Lamongan). *4*(2), 1113–1132.

Aulia, Y., Nasution, A. P., & Ramadhan, P. R. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderating di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11*(11), 4415–4423. https://doi.org/10.31604/jips.v11i11.2024.%25p

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). *Data realisasi APBD Pemerintah Kota Bandung tahun 2020–2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://djpk.kemenkeu.go.id

Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 5*(2), 116–130. https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.14194

Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi*. Salemba Empat.

Hamdigam, R. (2019). Pendapatan asli daerah Kota Surabaya sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. *Ilmu dan Riset Akuntansi*. https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/5148/5166

Hasugian, D. S. S., Sagala, I. C., & Dalimunthe, H. (2024). Analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan tahun 2017–2021 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal, 1*(2), 781–789. https://doi.org/10.62567/micjo.v1i2.77

Irwan. (2026). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(4), 444–450. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3426

Junaid, M. T., & Serliyana. (2024). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen, 20*(1), 42–50. https://doi.org/10.30872/jinv.v20i1.1687

Karenina, S., Andayani, K. D., Aditya, I. A., & Wasil, M. (2021). Tingkat kemandirian keuangan daerah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia, 2*(1), 27–41. https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6180

Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi ke-3). Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

Malau, E. I., Mutiara, I., Astuti, N. D., Waruwu, H. A. (2025). Pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah (pad) terhadap pertumbuhan ekonomi. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 20*(2), 55-61. https://doi.org/10.35794/gc.v20i2.61424

Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.

Patompo, D. A., & Untu, V. (2019). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013–2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 7*(3), 3159–3168. https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24202

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Syamsul, S., Rosyada, D., & Wahyono, D. (2022). Pendapatan daerah di Indonesia sebelum dan selama pandemi. *Jurnal Keuangan dan Bisnis, 20*(2), 125–134. https://doi.org/10.32524/jkb.v20i2.660

Theresiana, M., & Supriyadi. (2025). Kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Samarinda. *MLJ Merdeka Law Journal, 6*(1), 60–68.

Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 3*(2), 56–69. https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657